

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sifatnya mendasar dan menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun terutama di Indonesia. Hal ini terdapat pada tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang telah disepakati oleh 189 negara anggota PBB, termasuk Indonesia pada KTT Milenium PBB bulan September tahun 2000. Penanggulangan kemiskinan dan kelaparan menjadi prioritas utama dari delapan komponen MDGs (TNP2K, 2010)

Menurut Liu, et al (2017) kemiskinan adalah tantangan yang dihadapi semua negara dan masyarakat internasional secara keseluruhan. Kemiskinan hampir terjadi pada setiap negara di dunia terutama di negara berkembang. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) membagi tantangan terbesar pemerintah saat ini terdiri dari kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada garis kemiskin pada tahun 2016 mencapai 28,01 juta jiwa atau 10,86% sedangkan sebagian besar penduduk di Indonesia yang berada diatas garis kemiskinan masih rentan untuk jatuh pada taraf kemiskinan, sehingga hal tersebut yang disebut kerentanan. Kesenjangan yang terjadi pada masyarakat dipicu oleh pertumbuhan yang condong kepada kelompok menengah keatas atau masyarakat kaya, dimana pada 50 tahun terakhir gini rasio tertinggi mencapai 0,41.

Fenomena kemiskinan di perkotaan dan perdesaan tidak terlepas dari lapisan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhannya. Masalah kemiskinan berkaitan erat dengan keterbatasan asset yang dimiliki dan rendahnya akses dalam pemenuhan layanan umum oleh lapisan ini, sehingga menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya yang mencakup kebutuhan fisik,

mental, dan sosial. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, manusia akan berimplikasi pada ketelantaran anggota keluarga dan ketunaan sosial.

Churchill & Smyth (2017) menyatakan bahwa mengatasi kemiskinan adalah salah satu masalah yang paling mendesak yang dihadapi negara berkembang. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran, sehingga peran TNP2K sebagai basis data terpadu dapat mereferensi penetapan sasaran bagi program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pengukuran kemiskinan yang dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan dilaksanakan sejak tahun 1999 melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang *representative*, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*Social Capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Melihat perkembangan positif P2KP tersebut, kemudian tahun 2007 mulai dirintis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan mengadopsi P2KP menjadi bagian dari program tersebut, PNPM Mandiri P2KP diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs) sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015.

Orang miskin dan penghuni permukiman kumuh identik orang yang sama di perkotaan. Souza (1979) menekankan dua aspek masalah kemiskinan dan kekumuhan: pertama, orang miskin dan penduduk kumuh menempati anak tangga

terendah dalam hierarki sosial dan kedua, status sosial mereka diwariskan secara sosial dan bersifat abadi.

Permukiman kumuh banyak berkembang di perkotaan baik kota kecil maupun kota besar, dengan direncanakan ataupun tidak direncanakan. Seiring dengan adanya fenomena urbanisasi yang terjadi saat ini, yang merupakan salah satu penyebab timbulnya peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali di suatu wilayah perkotaan, dengan semakin berkembangnya suatu kota maka menjanjikan bagi para kaum urban untuk mencari kehidupan yang lebih baik tanpa memperhatikan lingkungan dimana mereka tinggal. Dalam konteks kawasan permukiman, permukiman kumuh diartikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan kondisi yang ada, permukiman kumuh dapat timbul pada kawasan permukiman yang sedang berkembang, ditandai dengan tingkat kepadatan bangunan atau penduduk yang tinggi, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Selain itu, permukiman kumuh dapat timbul atau berada pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman, seperti permukiman kumuh di sekitar kawasan sempadan sungai, ataupun lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan permukiman.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permukiman kumuh dapat timbul karena beberapa hal, seperti kondisi bangunan yang tidak layak huni akibat kondisi ekonomi masyarakat yang kurang memadai, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu memiliki bangunan rumah yang layak. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi pada kawasan permukiman kumuh mengindikasikan bahwa masyarakat tidak mampu untuk ‘membeli’ lahan yang lebih memadai untuk membangun hunian. Salah satu dampak dari tingkat kepadatan bangunan yang tinggi ialah sarana dan prasarana dasar permukiman yang ada tidak mampu memenuhi dan menjangkau seluruh kawasan permukiman

Permukiman kumuh merupakan tantangan terbesar bagi pemerintah kabupaten/kota untuk saat ini. Berdasarkan hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Cipta

Karya, pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di wilayah Indonesia. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut, mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian yang cukup kompleks, sehingga diperlukan kolaborasi beberapa pihak mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan dapat memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Dalam penelitian ini dihipotesakan bahwa masalah kemiskinan berbanding lurus atau relevan dengan kondisi kekumuhan suatu kawasan. Kemiskinan dan permukiman kumuh berjalan beriringan di perkotaan. Situasi ini, menunjukkan bahwa tidak ada orang miskin tinggal di luar perkampungan kumuh dan juga tidak menyiratkan bahwa setiap orang yang tinggal di daerah kumuh itu miskin. Tapi realitanya di masyarakat perkotaan tetap kebanyakan orang miskin tinggal di daerah kumuh dan sebagian besar penduduk kumuh miskin. Tidak diragukan lagi bahwa ada hubungan intim antara daerah kumuh dan kemiskinan.

Kecamatan Pamekasan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Pamekasan yang pernah mendapatkan program penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2005 mulai dari P2KP sampai PNPM Mandiri Perkotaan, kemudian pada tahun 2015 setelah berakhirnya program pengentasan kemiskinan diatas,

dilanjutkan program KOTAKU dengan sasaran mengentaskan permukiman kumuh. Namun tidak semua kelurahan/desa yang mendapatkan bantuan program KOTAKU, hanya mereka yang masuk dalam SK Kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati. Sedangkan tujuan program KOTAKU yaitu berusaha mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan permukiman yang baik dan sehat.

Berdasarkan gambaran kondisi kemiskinan dan kekumuhan diatas serta program-program pengentasan kemiskinan yang telah terlaksana di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, dimana program pengentasan pemukiman kumuh juga mulai mewarnai, hal ini yang menjadi alasan menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap relevansi aspek kemiskinan dan fisik lingkungan kumuh pada penentuan lokasi penerima program KOTAKU.

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan di kabupaten Pamekasan khususnya kecamatan Pamekasan merupakan masalah yang kompleks dan belum bisa terselesaikan, sehingga dalam penanganannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga dibutuhkan kerjasama antara pihak swasta, dan masyarakat. Selain itu salah satu aspek penting untuk menunjang keberhasilan terhadap program penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. P2KP dan PNPM Mandiri merupakan salahsatu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.

Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka hanya memprioritaskan kebutuhan primer (pangan) untuk bertahan hidup. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki keterbatasan terhadap akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi yang baik serta perumahan yang layak huni. Lingkungan dengan sanitasi buruk, persampahan tidak ada, drainase buruk, perumahan dengan kepadatan tinggi serta tidak layak huni dapat menyebabkan permukiman kumuh. Hal ini yang menjadi dasar adanya program KOTAKU di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Kelurahan/desa sasaran program KOTAKU merupakan kelurahan/desa yang pernah mendapatkan program pengentasan kemiskinan yakni program P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan, namun ada perbedaan dalam ketentuan bagi kelurahan/desa yang akan menerima bantuan pada program KOTAKU harus kelurahan/desa yang masuk dalam SK Kumuh. Berdasarkan keputusan Bupati Pamekasan No. 188/545/432.131/2015 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh, saat ini hanya terdapat 7 kelurahan/desa yang dianggap layak untuk mendapatkan bantuan dalam perbaikan permukiman kumuh. seperti pada tabel berikut:

Tabel I.1.
SK KUMUH KABUPATEN PAMEKASAN

NO	NAMA KAWASAN	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (Ha)
1	BARURAMBAT KOTA	PAMEKASAN	BARURAMBAT KOTA	26.35
2	GLADAK ANYAR	PAMEKASAN	GLADAK ANYAR	5.58
3	JUNGCANGCANG	PAMEKASAN	JUNGCANGCANG	10.09
4	NYALABU DAYA	PAMEKASAN	NYALABU DAYA	10.41
5	PANEMPAN	PAMEKASAN	PANEMPAN	5.82
6	PARTEKER	PAMEKASAN	PARTEKER	1.44
7	PATEMON	PAMEKASAN	PATEMON	1.22
	TOTAL LUAS			60.91

Sumber : SK Kumuh Bupati Pamekasan (2015)

KOTAKU sebagai program pemerintah yang menangani permukiman kumuh memiliki tujuan untuk mewujudkan perbaikan hidup masyarakat miskin dengan penataan permukiman yang baik dan sehat, melihat 7 kelurahan/desa yang masuk dalam SK Kumuh peneliti belum melihat sinkronisasi antara program penanggulangan kemiskinan dan program penanganan permukiman kumuh. Selain itu juga, pada penentuan permukiman kumuh yang sesuai dengan prosedur program KOTAKU belum terdapat instrumen yang berisi tentang kemiskinan, hanya variabel bersifat fisik bangunan yang menjadi kriteria permukiman kumuh.

Kemiskinan dan permukiman kumuh bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Dimana kemiskinan menyangkut kondisi sosial ekonomi, sedangkan permukiman kumuh menyangkut kondisi fisik bangunan dan

lingkungan tempat tinggal. Tujuan pelaksanaan Program KOTAKU adalah: “Mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur aman dan sehat”. Oleh sebab itu, peneliti mengajukan pertanyaan besar dalam penelitian ini yakni ***“apakah ada relevansi antara aspek kemiskinan dan fisik lingkungan kumuh dalam penentuan lokasi penerima program KOTAKU di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?”***

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana aspek kemiskinan dan fisik lingkungan kumuh dalam penentuan lokasi penerima program KOTAKU di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, sesuai dengan tujuan dari program KOTAKU untuk mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan permukiman yang baik dan sehat.

1.3.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi persebaran masyarakat miskin di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
2. Mengidentifikasi persebaran permukiman kumuh pada 7 (tujuh) kelurahan/desa sesuai SK Kumuh Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
3. Menganalisa relevansi persebaran masyarakat miskin dan persebaran permukiman kumuh dalam penentuan lokasi penerima program KOTAKU di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
4. Merekomendasi strategi penanganan permukiman kumuh pada program KOTAKU di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kecamatan Pamekasan merupakan salah satu Kecamatan Perkotaan di wilayah Kabupaten Pamekasan yang memiliki 18 kelurahan/desa, antara lain: Kelurahan Kangeran, Kelurahan Patemon, Kelurahan Parteker, Kelurahan Jungcangcang, Kelurahan Bugih, Kelurahan Gladak Anyar, Kelurahan Barurambat Kota, Kelurahan Kolpajung, Kelurahan Kowel, Desa Panempan, Desa Laden, Desa Teja Timur, Desa Teja Barat, Desa Bettet, Desa Nyalabu Laok, Desa Nyalabu Daya, Desa Toronan, dan Desa Jalmak.

Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah kelurahan/desa di Kecamatan Pamekasan yang masuk dalam SK Kumuh sebanyak 7 kelurahan/desa, yaitu Kelurahan Barurambat Kota, Kelurahan Parteker, Kelurahan Jungcangcang, Kelurahan Gladak Anyar, Kelurahan Patemon, Desa Panempan, dan Desa Nyalabu Daya.

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Melihat tujuan penelitian untuk merelevansikan antara aspek kemiskinan dan fisik lingkungan kumuh dalam penentuan lokasi penerima program KOTAKU di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan maka data sekunder terhadap jumlah kepala keluarga miskin pada penelitian ini diperoleh dari jumlah kepala keluarga yang masuk dalam kategori miskin sesuai dengan status kesejahteraan pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dalam TNP2K sedangkan data primer terhadap permukiman kumuh diperoleh melalui observasi, wawancara dan kuisioner terhadap stakeholder dan masyarakat dengan menggunakan instrumen kriteria permukiman kumuh dan perumahan kumuh yang telah ditetapkan pada program KOTAKU.

Ruang lingkup materi ini memiliki tujuan untuk membatasi materi yang akan dibahas dan pembatasan terhadap variabel-variabel yang akan diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lebih fokus, tepat sasaran dan sesuai target.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi perbedaan dari penelitian yang telah ada kemudian membandingkan antara penelitian saat ini dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya dapat dilihat dalam tabel I.1 berikut:

TABEL I.2
KEASLIAN PENELITIAN YANG DILAKUKAN

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aplikasi <i>Community Governance</i> Dalam Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan (Kushandajani, 2011)	Menggambarkan penerapan tata pemerintahan masyarakat di PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan)	Pendekatan Kualitatif dengan metode <i>field research</i>	Menggambarkan bahwa BKM Matra sebagai masyarakat dapat melakukan fungsi pemerintahan, misal: Kepemimpinan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kepemilikan Masyarakat
2	Kemiskinan dan Kebijakan Penanggulangannya di Kawasan Barat dan Timur Indonesia (Sri Wahyuni, 2011)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. • Merumuskan kebijakan yang diharapkan lebih efektif menurunkan kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia 	Pendekatan Kuantitatif	Faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia terbukti berbeda. Maka dari itu dalam upaya menanggulangi kemiskinan dibutuhkan kebijakan yang berbeda pula

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	Pola Spasial Kemiskinan Di Propinsi Jawa Tengah: Suatu Analisa Eksploratif (Evi Irawan, dkk; 2013)	Memaparkan analisa autokorelasi spasial eksploratif pola kemiskinan di provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2011	pendekatan kuantitatif	melalui uji Moran ^{**} I terdapat autokorelasi spasial pada persentase jumlah rumah tangga miskin di Jawa Tengah. Sementara itu, melalui uji LISA, disimpulkan bahwa terdapat pengelompokan lokasi rumah tangga miskin dibagian barat dan timur provinsi Jawa Tengah. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah perlu mempertimbangkan aspek spasial
4	Pemanfaatan Penginderaan Jauh Untuk Identifikasi Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Perkotaan (Studi Kasus : Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak) (Rezky Arief Ramadhan, 2014)	Mengkaji karakteristik kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Mranggen sebagai daerah penyangga Kota Semarang	pendekatan kuantitatif	Karakteristik permukiman kumuh di Kecamatan Mranggen kualitas bangunannya rendah, banyak terdapat bangunan semi permanen dan non permanen, jarak antar bangunan bervariasi (< 1,5 meter, 1,5 – 3,0 meter, dan > 3,0 meter)

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Relevansi Aspek Kemiskinan Dan Fisik Lingkungan Kumuh Dalam Penentuan Lokasi Penerima Program KOTAKU (Lia Andriana, 2018)	Mengkaji sejauh mana kemiskinan dan permukiman kumuh dalam penentuan lokasi program KOTAKU di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan	Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode <i>overlay</i>	Aspek kemiskinan memiliki relevansi dengan kondisi fisik lingkungan kumuh, dimana hal ini dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat. Prioritas penanganan permukiman kumuh cukup efektif untuk mencapai tujuan dalam mengurangi masalah permukiman secara maksimal.

Sumber : Analisa Peneliti (2018)

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan meliputi kalangan akademisi, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan masyarakat, antara lain:

a. Bagi Akademisi

Sebagai bahan kajian untuk mengetahui relevansi antara kemiskinan dan permukiman kumuh dalam program KOTAKU.

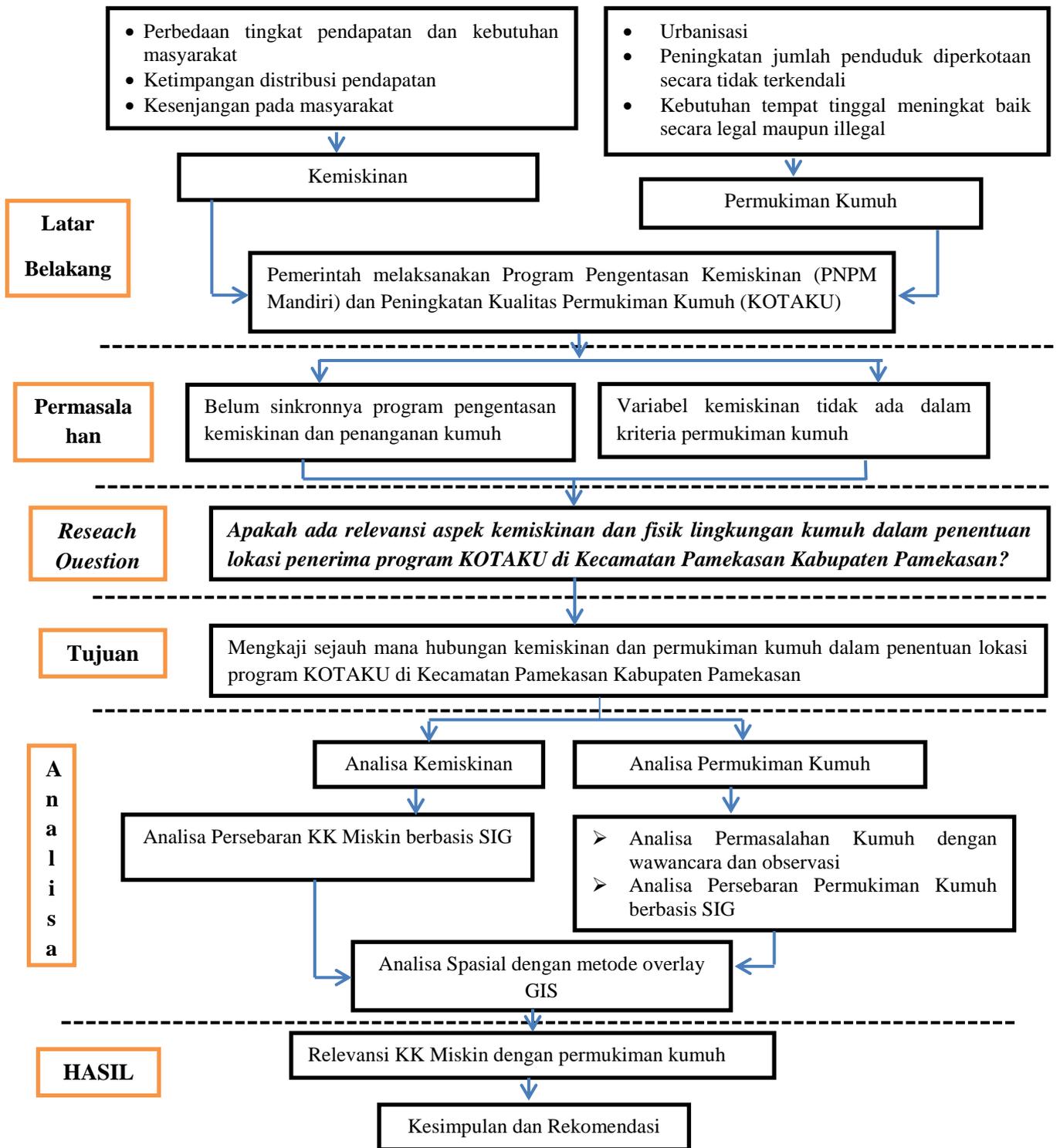
b. Bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Sebagai bahan masukan atau rekomendasi dalam menentukan lokasi penerima program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengurangan permukiman kumuh di Kabupaten Pamekasan.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi bahwa adanya relevansi antara kemiskinan dan permukiman kumuh dalam penentuan lokasi program KOTAKU. .

1.7 Kerangka Pemikiran



Sumber: Analisa Peneliti (2018)

**GAMBAR 1. 1
KERANGKA PIKIR**

1.8 Metodologi Penelitian

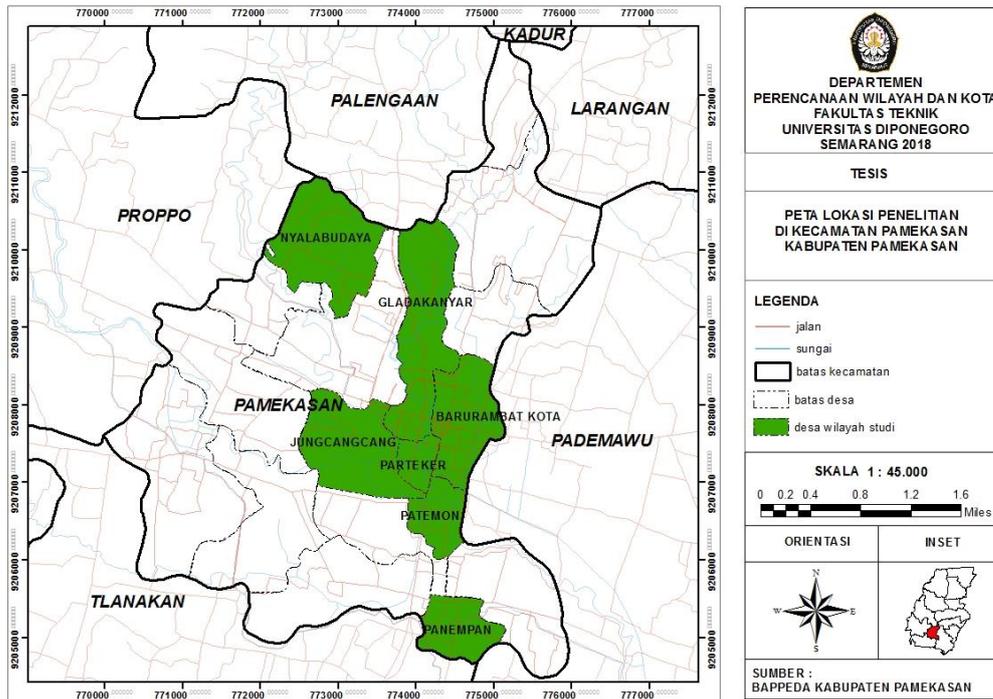
Penelitian ini mengambil sebuah fenomena mengenai kemiskinan dan permukiman kumuh yang ada di kecamatan Pamekasan sebagai salah satu kecamatan yang mendapat program KOTAKU., untuk melakukan proses penelitian maka digunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*).

Metode penelitian kombinasi adalah metode penelitian yang menggabungkan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa, pertama, kedua metode tersebut dapat digabungkan tetapi digunakan secara bergantian, kedua, metode tersebut tidak dapat digabungkan dalam waktu yang bersamaan, tetapi hanya teknik pengumpulan data yang dapat digabungkan. Newman & Benz (dalam Creswell 2013) juga menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif tidak bisa dipandang sebagai dua metode penelitian yang bersifat dikotomi dan bertentangan satu dengan yang lain, tetapi merupakan sebuah metode yang saling melengkapi. Metode penelitian kombinasi merupakan metode penelitian yang menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif untuk digunakan bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih akurat, komprehensif, valid, *reliable*, dan objektif.

Pada penelitian ini menggunakan metode kombinasi *sequential explanatory* ini tahapan pertama dilakukan adalah dengan menganalisa hasil penelitian kuantitatif, selanjutnya membangun hasil untuk menjelaskannya secara lebih rinci dengan penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang sudah terlebih dahulu dilakukan pada tahap pertama (Sugiyono, 2015).

1.8.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan pada Kelurahan Barurambat Kota, Kelurahan Jungcangcang, Kelurahan Gladak Anyar, Kelurahan Parteker, Kelurahan Patemon, Desa Panempun, dan Desa Nyalabu Daya. 7 kelurahan/desa tersebut merupakan kelurahan/desa yang masuk dalam SK Kumuh Kabupaten Pamekasan dengan kriteria peningkatan dan mendapatkan prioritas utama bantuan program KOTAKU.



Sumber: Analisa Peneliti (2018)

GAMBAR 1.2
PETA LOKASI PENELITIAN DI KECAMATAN PAMEKASAN
KABUPATEN PAMEKASAN

1.8.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data (*collecting data*) merupakan salah satu tahapan penting di dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2015). Data-data yang diperoleh ini nantinya akan dilakukan pengolahan kemudian dilakukan analisa.

.Dalam penelitian ini, jenis kebutuhan data yang diperlukan dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2015) dilihat dari cara mengumpulkan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya (triangulasi).

1.8.2.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data (Sugiyono, 2015). Pengambilan data primer biasanya dilakukan dengan

teknik wawancara (*interview*), observasi (*observation*) langsung di lapangan serta audio visual guna memperoleh data/ informasi yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan hasil survei yang optimal, seorang peneliti dapat melengkapi dirinya dengan beberapa alat bantu, diantaranya adalah buku catatan, perekam (recorder), dan kamera.

a) Wawancara

Pada penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur dalam pengumpulan data, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Wawancara secara terstruktur ini peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun sudah disiapkan (Sugiyono, 2015). Informan dalam penelitian ini akan mendapatkan pertanyaan yang sama dan peneliti akan mencatatnya.

b) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan secara langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian (Creswell, 2013). Observasi dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan data, tetapi juga peneliti akan mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, sehingga mendapatkan pandangan yang lebih menyeluruh dalam melihat kondisi kemiskinan dan permukiman kumuh di setiap kelurahan/desa.

c) Audio Visual

Berupa foto-foto berbagai aktivitas masyarakat, artefak dan bangunan bersejarah.

1.8.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan informan yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat dokumen (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data sekunder merupakan telaah dokumen dan hasil studi literatur. Dokumen didapatkan dari hasil survey instansi, seperti ke Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan, yang berupa dokumen kebijakan

terkait, dokumen penduduk yang masuk kategori miskin. Sedangkan studi literatur berupa kriteria-kriteria yang berkaitan dengan kemiskinan dan permukiman kumuh didapatkan dari tim fasilitator program KOTAKU, jurnal, buku dan informasi dari internet.

1.8.2.3 Kebutuhan Data Penelitian

Dalam penelitian, data diperlukan sebagai masukan untuk proses analisa data, sehingga sebelum peneliti melakukan pengumpulan data, maka semua keperluan penelitian seperti jenis kebutuhan data harus dipersiapkan. Kebutuhan data penelitian terinci dalam tabel IV.1 berikut:

TABEL 1.3
JENIS KEBUTUHAN DATA

No.	Fokus Penelitian	Kebutuhan Data	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Mengidentifikasi persebaran KK miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Nama Kepala Keluarga • Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 	Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • BPS • Tim TNP2K 	Wawancara
2.	Mengidentifikasi Lokasi penerima program KOTAKU	SK Kumuh Kabupaten Pamekasan	Sekunder	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Wawancara
3.	Mengidentifikasi persebaran perumahan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria kumuh menurut Program KOTAKU • Kriteria pemilihan lokasi 	Primer dan sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • Tim Fasilitator • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Observasi • Audio visual

Sumber: Analisa Peneliti (2018)

1.8.3 Populasi dan Penentuan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok masyarakat dan kelompok ahli terkait aspek kemiskinan dan permukiman kumuh.

1. Kelompok masyarakat adalah seluruh masyarakat di lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan pada kelompok ini dengan jumlah populasi yang dapat diketahui secara pasti, sehingga pengambilan sampel penelitian di lokasi studi digunakan untuk mengetahui preferensi masyarakat terkait 7 aspek yang berperan penting dalam penentuan kriteria permukiman kumuh yang telah menjadi instrument dalam program KOTAKU.

Studi ini menggunakan rumus slovin (sevilla 1960: 182) sampel untuk bahan studi dengan alasan bahwa peneliti tidak mungkin untuk mengamati seluruh anggota populasi, dan juga sampel penggunaan ini sangat berguna untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Sebelum dilakukan pengambilan sampel, tentunya jumlah populasi telah diperhitungkan terlebih dahulu.

Jumlah populasi yang digunakan adalah jumlah penduduk di lokasi penelitian, hal ini dikarenakan penduduk adalah objek utama studi baik sebagai penghuni ataupun pelaku aktivitas perdagangan dan jasa. Adapun penentuan jumlah sampel yang diambil dalam studi ini ditentukan dengan menggunakan formula:

Rumus Slovin

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

Dimana:

- n = *Number of samples* (ukuran sampel)
 N = *Total population* (jumlah seluruh anggota populasi)
 d = *Error tolerance* (toleransi terjadinya galat; taraf signifikansi)

Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas toleransi kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Dalam penentuan sample ini, penelitian menggunakan batas kesalahan 5% berarti memiliki tingkat akurasi 95%.

Dengan jumlah populasi yang sama, semakin kecil toleransi kesalahan, semakin besar jumlah sampel yang dibutuhkan.

Sebagai contoh, jika yang akan kita teliti itu sebanyak 1.000 kepala keluarga di pemukiman kumuh, seperti dicontohkan di muka, dengan tingkat akurasi 95%, dan tingkat kesalahan 5%, maka besarnya sampel kuisisioner menurut rumus *Slovin* ini akan menjadi:

$$n = \frac{1000}{1000(0,05)^2 + 1} = \frac{1000}{1000(0,0025) + 1} = \frac{1000}{2,5 + 1} = \frac{1000}{3,5} = 285,714 \approx 286$$

Orang

Jadi contoh sampele quisioner yang di butuhkan penulis sebanyak 286, dari 1000 warga yang menempati kawasan kumuh itu sendiri.

Sedangkan pada penelitian ini untuk sampel kuisisioner dari 8130 KK pada kelurahan/desa lokasi sesuai SK Kumuh adalah sebanyak 382 KK.

2. Kelompok ahli adalah pejabat pemerintah, konsultan, dan komunitas atau BKM berjumlah 4 (empat) orang yang memahami karakteristik dan kondisi permukiman kumuh di lokasi studi. Teknik pengambilan sampel responden pada kelompok ini yaitu *non probability sampling* dengan cara pengambilan sampel menggunakan teknik analisa *purposive sampling*. Penggunaan metode *non probability sampling* dalam pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak. Pemilihan sampel didasari oleh subjektifitas peneliti dalam menentukan cakupan penelitian, sehingga tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling* dimana peneliti menentukan kriteria-kriteria tertentu terhadap para ahli yang dianggap representatif dengan penelitian ini. Oleh karena itu, diharapkan akan menghasilkan sebuah informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

TABEL I. 4
KRITERIA PEMILIHAN NARASUMBER

No	Narasumber	Kriteria	Justifikasi Pemilihan
1.	Pejabat Pemerintah		
	a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Menduduki jabatan tertentu dalam instansi • Berperan dalam program KOTAKU 	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak yang memiliki kewenangan dalam perumusan

No	Narasumber	Kriteria	Justifikasi Pemilihan
	Pamekasan (eselon 2, 3, dan 4)	<ul style="list-style-type: none"> Memahami karakteristik dan kondisi lokasi penelitian 	kebijakan program
2.	Akademisi		
	b. Konsultan Program KOTAKU	<ul style="list-style-type: none"> Berperan dalam penataan kelengkapan prasarana jalan Memahami karakteristik dan kondisi lokasi penelitian 	Pihak yang memiliki kewenangan dalam menangani program
3.	Komunitas atau Lembaga		
	c. BKM (Badan Keswadfayaan Masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki pengetahuan tentang program Memahami karakteristik dan kondisi lokasi penelitian 	Pihak yang memahami karakteristik permukiman kumuh

Sumber: Analisa Peneliti (2018)

Berdasarkan justifikasi di atas, ditetapkan jumlah responden kelompok ahli pada penelitian ini sebanyak 4 (empat) sampel yang terdiri atas pejabat pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, konsultan 1 (satu) orang, dan komunitas atau lembaga sebanyak 1 (satu) orang.

1.8.4 Teknik Analisa Data

a. Analisa Kualitatif

Setelah melakukan tahapan pengumpulan data, tahap berikutnya adalah tahap pengolahan data dan analisa data. Pada analisa pengidentifikasian persebaran masyarakat miskin yang didasarkan pada persentase Kepala Rumah Tangga Miskin, kemudian dilakukan penentuan status tingkat kemiskinan dan pemberian nilai atau bobot pada status tersebut dengan mengadopsi aturan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, untuk memudahkan dalam melakukan skoring, sehingga nantinya dapat digunakan dalam memberikan prioritas dalam penentuan lokasi penerima bantuan program KOTAKU. Selain itu juga untuk variabel lain yang bersifat non fisik meliputi kondisi hak milik lahan, perijinan bangunan pada penelitian ini diasumsikan tidak ada, dalam artian bahwa hak milik lahan dan perijinan bantuan diabaikan. Pemberian skor tersebut berdasarkan persentase tingkat kemiskinan, yaitu sebagai berikut:

- Kepala Rumah Tangga miskin tinggi = Skor 5 = 76% - 100%

- Kepala Rumah Tangga miskin sedang = Skor 3 = 51% - 75%
- Kepala Rumah Tangga miskin rendah = Skor 1 = 25% - 50%
- Kepala Rumah Tangga non miskin = Skor 0 = 0% - 24%

Untuk menganalisa identifikasi permukiman kumuh pada tiap kelurahan/desa juga dilakukan dengan sistem skoring di setiap sub indikator dengan ketentuan sebagai berikut : 25% - 50% skor 5, 51% - 75% skor 3, dan 76% - 100% skor 1, kemudian semua skor dijumlahkan untuk menentukan kriteria kekumuhan pada suatu kawasan, kriteria kekumuhan meliputi :

- Kumuh Tinggi dengan total nilai penjumlahan 71 - 95
- Kumuh Sedang dengan total nilai penjumlahan 45 - 70
- Kumuh Rendah dengan total nilai penjumlahan 19 - 44

Penentuan suatu kawasan memiliki relevansi antara kemiskinan dan kondisi fisik lingkungan kumuh dapat diketahui apabila suatu kawasan tersebut memiliki kriteria dengan kepala rumah tangga miskin baik rendah, sedang dan tinggi serta kawasan tersebut juga masuk dalam kriteria kawasan dengan tingkat kekumuhan rendah, sedang dan tinggi. Selain untuk mengetahui relevansi antara kemiskinan dan fisik lingkungan kumuh, analisa skoring tersebut bisa digunakan untuk menentukan prioritas penanganan lingkungan kumuh pada tiap kelurahan/desa, yaitu dengan cara menjumlahkan antara nilai skor pada analisa kemiskinan dan analisa permukiman kumuh. Semakin tinggi nilainya maka kelurahan/desa tersebut yang menjadi prioritas utama.

Tahapan berikutnya hasil analisa identifikasi persebaran kepala rumah tangga miskin dan identifikasi kawasan dengan fisik lingkungan kumuh di olah secara spasial menggunakan metode overlay dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS 10.2. dimana Overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda. Secara sederhana overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik. sehingga didapatkan output peta dengan lokasi yang sesuai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

b. Analisa Data Kualitatif (Deskriptif Kualitatif)

Pada penelitian ini, analisa data kualitatif menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif guna memberikan deskripsi secara mendalam mengenai informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan *review* kebijakan. Pada analisa data kualitatif terdapat tiga jalur analisa data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013). Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi data pada penelitian dilakukan dengan *coding* terhadap hasil wawancara, contoh kode berikut ini.

(AD, 05-02-2018, 5-7)(4)

Dimana,

AD = Singkatan nama dari subyek penelitian

05-02-2018 = tanggal pelaksanaan wawancara

5-7 = lokasi baris dalam *verbatim* (baris ke-5 hingga baris ke-7)

Selanjutnya data yang sudah berbentuk *script* kemudian dikelompokan berdasarkan tema dan sub bab sesuai dengan *verbatim* wawancara. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui teks naratif yang menggabungkan informasi yang diperoleh dari kebijakan eksisting dan dokumen perencanaan strategis instansi pemerintah daerah yang terkait dengan lokasi permukiman kumuh yang masuk dalam SK Kumuh di Kabupaten Pamekasan dengan hasil wawancara.

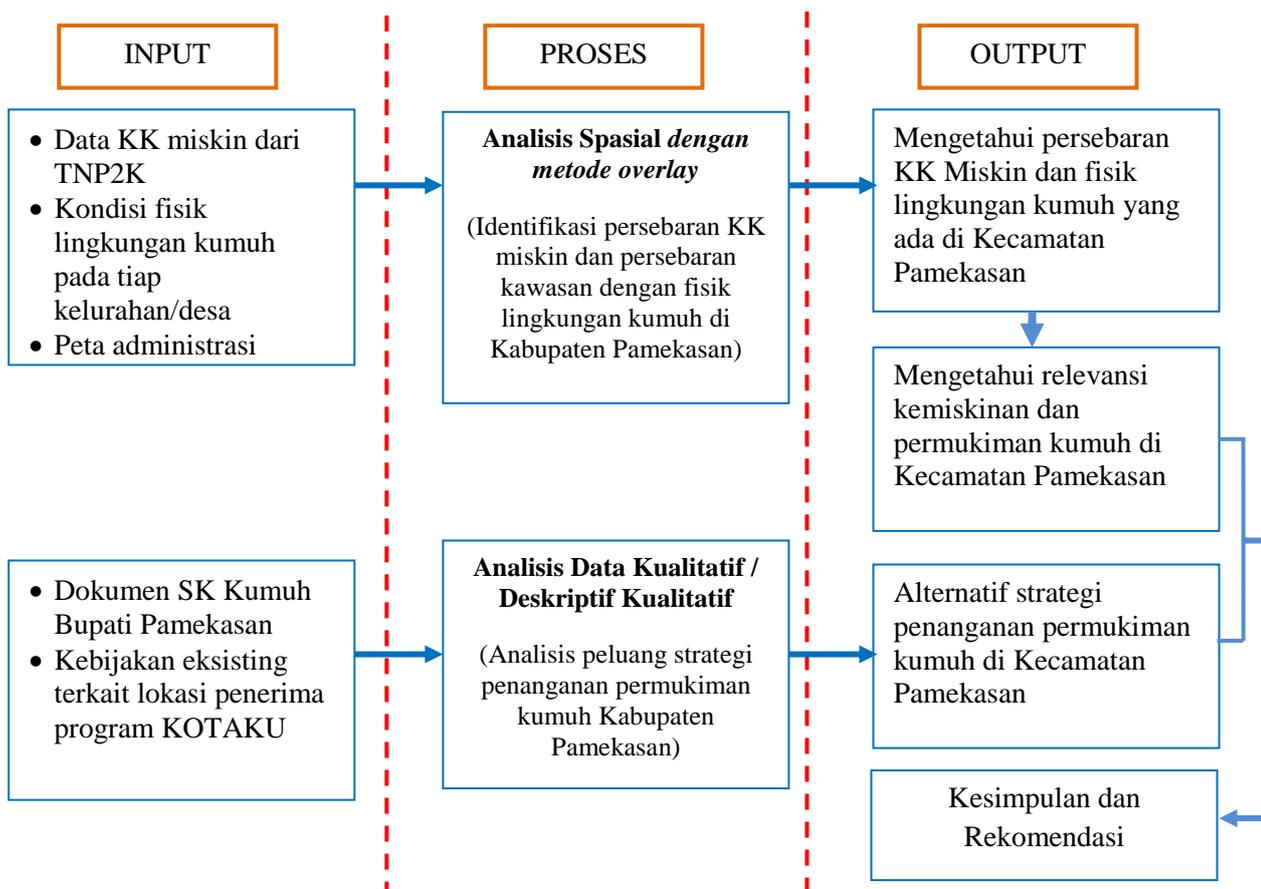
Analisa data kualitatif ini memerlukan sebuah teknik validasi data. Validasi data kualitatif merupakan upaya pemeriksaan akurasi hasil penelitian baik dari sudut pandang peneliti, partisipan atau pembaca umum dengan menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi data ini dapat dilakukan

untuk mencari titik temu informasi melalui langkah membandingkan berbagai sumber data dengan perspektif yang diungkapkan partisipan (Creswell, 2013).

Dalam penelitian ini, analisa data kualitatif dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji dokumen perencanaan strategis yang ada pada pemerintah sebagai sumber informasi penelitian. Selanjutnya melalui wawancara dengan sumber informasi baik dari pemerintah maupun non pemerintah serta melalui survey pada lokasi kumuh yang terdapat pada SK Kumuh, kemudian informasi tersebut dirumuskan secara lebih sistematis dalam sebuah susunan strategi penanganan permukiman kumuh.

1.8.5 Kerangka Analisa

Berikut kerangka analisa yang dilakukan pada proses analisa data primer dan data sekunder.



Sumber: Analisa Peneliti (2018)

GAMBAR 1.3
KERANGKA ANALISA

1.9 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dari penelitian yang dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup, originalitas penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Literatur

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung dalam penelitian, antara lain terkait kemiskinan, permukiman kumuh, dan sistem informasi geografi (SIG).

BAB III Gambaran Umum

Bab ini berisikan gambaran umum wilayah studi yaitu Kecamatan Pamekasan, kondisi kemiskinan di Kabupaten Pamekasan dan kondisi permukiman yang ada di Kecamatan Pamekasan

BAB IV Hasil dan Analisa

Bab ini berisi tentang identifikasi persebaran masyarakat miskin, identifikasi persebaran permukiman kumuh, analisi relevansi aspek kemiskinan dan fisik lingkungan kumuh dan analisa strategi penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU.

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari kajian penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi terkait penentuan prioritas penanganan permukiman kumuh.

